

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI



RENJA

INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyusun Renja SKPD setiap 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 356 berbunyi bahwa Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Inspektorat Kota Tebing Tinggi menyampaikan Rancangan Renja Inspektorat tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijadikan pedoman dan acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melalui program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Demikian Rancangan Renja ini kami sampaikan kiranya dapat memberi kontribusi yang berarti dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kota Tebing Tinggi.



Tebing Tinggi, 15 Maret 2024

INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI

H. KAMILAN, SH, MM, CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650603 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	2
BAB II	
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	10
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	11
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	14
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	14
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	14
3.3 Program dan Kebijakan	15
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	21
BAB V	
PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan Pasal 15 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dengan melakukan koordinasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan.

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 ini merupakan acuan bagi seluruh aparat Inspektorat Kota Tebing Tinggi selama tahun rencana kegiatan, yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi.
2. Meningkatkan tingkat akuntabilitas tata kelola pemerintah dan kesadaran hukum bagi masyarakat.
3. Meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah dalam rangka menuju opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tersedianya Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) melalui penerapan teknologi Informasi, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan, meningkatnya kuantitas dan kualitas aparat pengawasan yang ditunjukkan dengan bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan, etika dan moralitas agar dapat mandiri dan profesional melaksanakan tugas pengawasan.

Ketiga agenda tersebut merupakan dasar utama untuk mencapai tujuan strategis Inspektorat Kota Tebing Tinggi di mana ketiga agenda tersebut merupakan satu kesatuan dan dilaksanakan secara komprehensif dan bersamaan, baik dalam upaya penyelesaian masalah-masalah yang strategis maupun mendesak.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi tahun 2022 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- i. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- j. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
- k. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi:

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat;
- b. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada dasarnya pembuatan Renja Tahun 2024 ini merupakan piranti untuk mengkomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan, melalui penyajian data yang transparan tentang rancangan rencana kerja suatu organisasi pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2024.

Untuk memberikan gambaran tentang hal tersebut maka penyajian Renja Tahun 2024 ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 dan mengacu pada pencapaian Renja perangkat daerah pada tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap Renja tahun sebelumnya agar menjadi perbandingan bagi penyusunan Renja perangkat daerah tahun berikutnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat dianalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non-fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Inspektorat Kota Tebing Tinggi

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023-2026)		Realisasi Target Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra						
			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)											
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase OPD tertib Administrasi keuangan	48	bulan	40.382.005.881							12	bulan	Rp7.521.338.274	12	bulan					
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		96	Laporan	65.662.304							24	Laporan	Rp12.498.530	24	Laporan	440.500				
6.01.01.2.01.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	37.289.000	1	Tahun	-	1	Tahun	0	1	Tahun	*DIV/0!	0	0	-	0,00%			
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	bulan	65.662.304	1	Tahun	-	1	Tahun	0	1	Tahun	*DIV/0!	12	bulan	440.500	0,67%			
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		48	Dokumen	29.132.611.330		-	0				12	Dokumen	Rp5.545.263.902	12	Dokumen					
6.01.01.2.03.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	48	bulan	29.132.611.330	1	Tahun	-	1	Tahun	0	1	Tahun	*DIV/0!	12	bulan	Rp5.545.263.902	12	bulan	5.343.504.436	18,34%
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		48	Dokumen	139.122.088			0				12	Dokumen	Rp26.481.275	12	Dokumen					
6.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Tahun	139.122.088	1	Tahun	-	1	Tahun	0	1,25	Tahun	*DIV/0!	1	Tahun	Rp26.481.275	1	Tahun	20.765.475	14,93%
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		48	Dokumen	1.515.454.804		-	0				12	Dokumen	Rp228.693.577	12	Dokumen					
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120	Paket	99.660.000	1	Tahun		0	1	Tahun	1	Tahun	*DIV/0!	0	0		0,00%			
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kualitas SDM	48	bulan	1.515.454.804	15	Kgt	-	6	Kgt	0	15	Kgt	*DIV/0!	12	bulan	Rp228.693.577	12	bulan	1.142.056.705	75,36%
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		60	Dokumen	3.711.543.662		-	0				60	Dokumen	Rp706.475.944	60	Dokumen					
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	Tahun	99.374.516	12	Bln		6	Bln	0	12	Bln	*DIV/0!	1	Tahun	Rp18.915.500	1	Tahun	12.052.900	12,13%
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	bulan	152.109.349	12	Bln	-	6	Bln	0	12	Bln	*DIV/0!	12	bulan	Rp28.953.343	12	bulan	21.954.500	14,43%
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	48	bulan	839.694.325	12	Bln	-	6	Bln	0	12	Bln	*DIV/0!	12	bulan	Rp159.832.106	12	bulan	87.707.500	10,45%
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	48	bulan	708.839.485	12	Bln	-	6	Bln	0	12	Bln	*DIV/0!	12	bulan	Rp134.924.465	12	bulan	66.787.000	9,42%
6.01.01.2.06.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	bulan	1.911.525.986	12	Bln	-	6	Bln	0	12	Bln	*DIV/0!	12	bulan	Rp363.850.529	12	bulan	753.879.041	39,44%
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4	Tahun	1.549.073.384		-	0				1	Tahun	Rp237.268.346	1	Tahun					
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Tahun	616.040.000	1	Unit	-	0	1	Unit	1	Unit	*DIV/0!	-	0	-	288.450.000		46,82%	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	4	Tahun	374.938.825	1	Tahun	-	0	Tahun	0	1	Tahun	*DIV/0!	1	Tahun	Rp57.428.599	1	Tahun	136.300.000	36,35%
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Mebel Peralatan dan Mesin Lainnya	4	Tahun	1.174.135.559	1	Tahun	-	1	Tahun	0	1	Tahun	*DIV/0!	1	Tahun	Rp179.839.747	1	Tahun	356.678.000	30,38%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023-2026)		Realisasi Target Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra					
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
			4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)			
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		48	bulan	1.338.778.560	-	-	6	Bln	0	12	Bln	#DIV/0!	12	bulan	Rp257.216.763	12	bulan		
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	48	bulan	118.067.974	12	Bln	-	6	Bln	0	12	Bln	#DIV/0!	12	bulan	Rp13.439.159	12	bulan	1.500.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	bulan	646.978.026	12	Bln	-	6	Bln	0	12	Bln	#DIV/0!	12	bulan	Rp123.149.410	12	bulan	95.452.327
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	bulan	633.732.559	12	Bln	-	6	Bln	0	12	Bln	#DIV/0!	12	bulan	Rp120.628.194	12	bulan	98.681.670
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	Tahun	2.929.759.748	-	-	-	-	0	-	-	-	1	Tahun	Rp507.439.937	1	Tahun		
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	Tahun	1.484.591.742	1	Tahun	-	1	Tahun	0	1	Tahun	#DIV/0!	1	Tahun	Rp257.134.101	1	Tahun	55.259.100
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	4	Tahun	491.617.897	1	Tahun	-	6	Bln	0	1	Tahun	#DIV/0!	1	Tahun	Rp85.149.151	1	Tahun	3.150.000
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	Tahun	953.550.109	1	Tahun	-	1	Tahun	0	1	Tahun	#DIV/0!	1	Tahun	Rp165.156.685	1	Tahun	199.575.000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		97	Persen	14.195.141.220	-	-	-	-	0	-	-	-	0,97	-	Rp2.612.243.970	1	-		
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		372	Laporan	9.708.672.706	-	-	-	-	0	-	-	-	93	Laporan	Rp1.786.626.941	93	Laporan		
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40	Laporan	1.937.972.291	12	Kgt	-	5	Kgt	0	12	Kgt	#DIV/0!	10	Laporan	Rp356.633.045	10	Laporan	63.200.000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	80	Laporan	3.875.944.582	32	Obrik	-	6	Obrik	0	32	Obrik	#DIV/0!	20	Laporan	Rp713.266.089	20	Laporan	430.750.000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya penelaahan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi	128	Laporan	465.113.350	1	Kgt	-	3	Kgt	0	1	Kgt	#DIV/0!	32	Laporan	Rp85.591.931	32	Laporan	154.805.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya penelaahan atas Laporan Keuangan, RKA,RKPD,RPJMD, dan Penyerapan Anggaran Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi	60	Laporan	1.162.783.375	23	Kgt	-	8	Kgt	0	23	Kgt	#DIV/0!	15	Laporan	Rp213.979.827	15	Laporan	198.138.000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	20	Laporan	387.594.458	0	Bln	-	0	Bln	0	0	Bln		5	Laporan	Rp71.326.609	5	Laporan	16.575.000
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Internal	28	Laporan	808.392.842	1	Kgt	-	1	Kgt	0	1	Kgt	#DIV/0!	7	Laporan	Rp148.763.531	7	Laporan	22.350.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2023-2026)	Realisasi Target Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun									Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)			Tingkat Realisasi (%)						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)				
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16	Laporan	1.070.871.809	4	Kgt	-	1	Kgt	0	4	Kgt	12	Kgt	#DIV/0!	4	Laporan	Rp197.065.910	4	Laporan	80.745.000	7,54%
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		416	Laporan	4.486.468.514			-			0			41	Laporan	Rp825.617.029	41	Laporan					
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4	Laporan	1.385.712.850	1	Tahun	-	0	Tahun	0	1,25	Tahun	1	Tahun	#DIV/0!	1	Laporan	Rp255.004.158	1	Laporan	88.160.000	6,36%
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	160	Laporan	3.100.755.664	41	Kasus	-	22	Kasus	0	41	Kasus	50	Kasus	#DIV/0!	40	Laporan	Rp570.612.871	40	Laporan	316.350.000	10,20%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		97	Persen	1.997.905.600			-			0			0,97		Rp424.762.000	1						
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		4	Laporan	88.112.946			-			0			1	Laporan	Rp18.733.133	1	Laporan					
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	4	Rekomendasi	90.071.600	4	Kgt	-	0	Tahun	0	4	Kgt	4	Kgt	#DIV/0!	1	Rekomendasi	Rp22.517.900	1	Rekomendasi	29.014.000	32,21%
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	4	Laporan	88.112.946	1	Tahun	-			0	1	Tahun	1	Tahun	#DIV/0!	1	Laporan	Rp18.733.133	1	Laporan	100.236.000	113,76%
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		40	Laporan	1.909.792.654			-			0			10	Laporan	Rp406.028.867	10	Laporan					
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20	Kegiatan	872.972.826	1	Kgt	-	1	Kgt	0	1	Kgt	1	Kgt	#DIV/0!	5	Kegiatan	Rp185.597.199	5	Kegiatan	91.416.541	10,47%
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	16	Laporan	255.894.324	1	Tahun	-	1	Tahun	0	1	Tahun	1	Tahun	#DIV/0!	4	Laporan	Rp54.404.064	4	Laporan	24.882.523	9,72%
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terselenggaranya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	Laporan	780.925.505	2	Kgt	-	0	Kgt	0	2	Kgt	2	Kgt	#DIV/0!	1	Laporan	Rp166.027.604	1	Laporan	16.569.000	2,12%
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40	Perangkat Daerah	101.640.000	0	Kgt	-			0	0	Kgt	1	Kgt	#DIV/0!	10	Perangkat Daerah	Rp25.410.000	10	Perangkat Daerah	145.838.500	143,49%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi, Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan dokumen Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 terhadap tujuan, sasaran, serta indikator

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL TAHUN 2023	TARGET TAHUN			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai	94%	94%	95%	95%	97%
	Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	98%	98%	98%	100%	100%
	Persentase penyelesaian kasus pengaduan	98%	98%	98%	100%	100%
	Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B	90%	93%	95%	97%	100%
Meningkatnya Integritas dan Penyelenggaraan Pengawasan	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Renstra Inspektorat tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Kota Tebing Tinggi

INDIKATOR KINERJA	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	7	8	9		10
Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai	94%	95%	95%	97%	95,54%	95%	95%	97%	
Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material	98%	98%	100 %	100 %	100%	98%	100 %	100 %	
Persentase penyelesaian kasus pengaduan	98%	98%	100 %	100 %	100%	98%	100 %	100 %	
Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B	93%	95%	97%	100 %	100%	95%	97%	100 %	
Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	

Secara umum, tren Indikator Kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan sejak Tahun 2019. 6 (enam) indikator mengalami peningkatan hingga melebihi target yang telah ditetapkan.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu:

- a. Faktor Pendorong:
 - Mekanisme kerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang berorientasi kepada pencapaian kinerja;
 - Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan, auditor dan staf Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi;

- Adanya kerja sama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan;
 - Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
- b. Faktor Penghambat :
- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibandingkan dengan jumlah obrik yang diperiksa.
 - Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan.
 - Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah masih belum optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Peran Inspektorat sebagai organisasi utama dari Kepala Daerah dalam hal pengawasan semakin mendapat dukungan. Salah satu tugas besar Inspektorat saat ini adalah penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah daerahnya melalui MoU antara APH dan APIP, Inspektorat dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam penentuan pelanggaran yang ditemui dalam kasus-kasus dugaan korupsi yang ada. Terkait peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, Inspektorat merupakan salah satu *leading sector* dalam hal pembinaan Perangkat Daerah agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Demikian halnya juga dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan dari pusat seperti Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, dimana Inspektorat merupakan asesor tingkat kota dengan mengedepankan *profesional judgment* dalam setiap penilaiannya. Beberapa isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Tebing Tinggi dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Tahun 2022, Kota Tebing Tinggi mendapatkan WTP, akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi secara keseluruhan sudah ada peningkatan (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2023 = B, hasil evaluasi dari Kemenpan RB), tantangan ke depan terhadap SAKIP Kota Tebing Tinggi adalah bagaimana untuk meningkatkannya;
- c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah dilaksanakan dengan optimal karena Kepala Perangkat Daerah sudah terbiasa dengan pengendalian risiko yang ada di lingkungan unit kerjanya;
- d. Memastikan Kapabilitas APIP sampai saat ini sudah mendapat level 3 dengan tetap mengedepankan profesionalisme APIP;
- e. Menambah Kapabilitas dan Kompetensi Aparatur Pengawas dengan memperbanyak jumlah Diklat dan Pelatihan Kantor Sendiri.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dengan adanya beberapa kebijakan yang datang dari pusat, maka Inspektorat Kota Tebing Tinggi juga harus menyesuaikan Program dan Kegiatannya untuk memenuhi tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyesuaian yang dilakukan tentunya bukan hanya penambahan anggaran semata, akan tetapi harus melalui perhitungan, analisis dan survei. Dengan adanya penambahan kegiatan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, maka perlu koordinasi dengan instansi pusat yang menugaskannya, menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menghitung kembali kebutuhan-kebutuhan agar kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan maksimal dan menghasilkan output yang baik.

Dengan adanya penambahan kegiatan, tentunya pasti menambah volume pekerjaan. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan kembali kebutuhan pegawai khususnya aparatur pengawas agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Bukan hanya dari segi kuantitas, kualitas SDM Aparatur juga perlu diperhatikan dengan cara menganalisis kebutuhan untuk Diklat pegawai dan Pelatihan Kantor Sendiri.

Perencanaan yang baik juga harus memastikan kegiatan yang berjalan didukung dengan fasilitas yang memadai. Untuk itu, selain dari kegiatan inti pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi, perlu juga dihitung kembali setiap kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan inti agar setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki kendala yang berarti.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel T-C.31
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T. Tinggi	Tersedianya Kebutuhan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	9.426.306.700	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T. Tinggi	Tersedianya Kebutuhan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	9.426.306.700	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	T. Tinggi	Jumlah Bulanan Penyelesaian Laporan	12 bulan	17.934.700	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	T. Tinggi	Jumlah Bulanan Penyelesaian Laporan	12 bulan	17.934.700	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	T. Tinggi	Jumlah Bulanan Ketersediaan Penghasilan ASN	12 bulan	6.234.323.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	T. Tinggi	Jumlah Bulanan Ketersediaan Penghasilan ASN	12 bulan	6.234.323.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	T. Tinggi	Jumlah Ketersediaan Pakaian dinas dan diklat ASN	1 tahun	1.446.493.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	T. Tinggi	Jumlah Ketersediaan Pakaian dinas dan diklat ASN	1 tahun	1.446.493.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	T. Tinggi	Jumlah penyediaan komponen listrik, perlengkapan kantor, bahan logistic, cetakan, dan perjalanan dinas	12 bulan	856.995.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	T. Tinggi	Jumlah penyediaan komponen listrik, perlengkapan kantor, bahan logistic, cetakan, dan perjalanan dinas	12 bulan	856.995.600	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	T. Tinggi	Pengadaan kebutuhan meubiler, dan peralatan kantor	1 tahun	498.946.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	T. Tinggi	Pengadaan kebutuhan meubiler, dan peralatan kantor	1 tahun	498.946.400	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T. Tinggi	Ketersediaan surat menyurat, ketersediaan jasa komunikasi dan listrik, ketersediaan jasa pegawai	1 tahun	236.414.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T. Tinggi	Ketersediaan surat menyurat, ketersediaan jasa komunikasi dan listrik, ketersediaan jasa pegawai	1 tahun	236.414.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T. Tinggi	Pemeliharaan kendaraan dinas, gedung peralatan, kantor,	1 tahun	120.200.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	T. Tinggi	Pemeliharaan kendaraan dinas, gedung peralatan, kantor,	1 tahun	120.200.000	
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	T. Tinggi	Persentase Hasil Pengawasan Internal Yang Ditindaklanjuti	97 Persen	2.278.140.500	Program Penyelenggaraan Pengawasan	T. Tinggi	Persentase Hasil Pengawasan Internal Yang Ditindaklanjuti	97 Persen	2.278.140.500	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	T. Tinggi	Terlaksananya Pengawasan kinerja, keuangan, reviw laporan kinerja, review laporan keuangan, pengawasan desa, Kerjasama pengawasan desa, Kerjasama pengawasan internal, monev tindak lanjut pemeriksaan BPK dan APIP	1 tahun	1.576.881.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	T. Tinggi	Terlaksananya Pengawasan kinerja, keuangan, reviw laporan kinerja, review laporan keuangan, pengawasan desa, Kerjasama pengawasan desa, Kerjasama pengawasan internal, monev tindak lanjut pemeriksaan BPK dan APIP	1 tahun	1.576.881.000	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	T. Tinggi	Terlaksananya penyelesaian kerugian negara, dan	1 tahun	701.259.500	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	T. Tinggi	Terlaksananya penyelesaian kerugian negara, dan	1 tahun	701.259.500	

			pengawasan dengan tujuan tertentu					pengawasan dengan tujuan tertentu			
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	T. Tinggi	Persentase Hasil Pembinaan Internal Yang dilaksanakan	97 Persen	477.415.400	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	T. Tinggi	Persentase Hasil Pembinaan Internal Yang dilaksanakan	97 Persen	477.415.400	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	T. Tinggi	Jumlah kegiatan penilaian kapabilitas APIP		45.587.900	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	T. Tinggi	Jumlah kegiatan penilaian kapabilitas APIP		45.587.900	
2	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya kegiatan pendampingan asistensi, RB, pemberantasan korupsi, dan SPI KPK		431.827.500	Pendampingan dan Asistensi		Terlaksananya kegiatan pendampingan asistensi, RB, pemberantasan korupsi, dan SPI KPK		431.827.500	
					12.181.862.600						12.181.862.600

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2023 berada pada tahap awal dari RPD Kota Tebing Tinggi 2023-2026.

Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun 2023 mengambil tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan tujuh agenda prioritas nasional di mana fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19, adapun prioritas pembangunan nasional tersebut adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan atas rumusan isu-isu penting terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam bidang pengawasan dan sesuai dengan Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-

2026. Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Rumusan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
2	3	4	5
Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	BB
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Adapun program/kegiatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
							Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 8.927.360.300,00	Rp. 498.946.400,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 9.426.306.700,00	Rp. 9.860.629.389,00
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 17.934.700,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 17.934.700,00	Rp. 15.865.389,00
6	01	01	2.01	0001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tabing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.763.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.763.000,00	Rp. 0
6	01	01	2.01	0006	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tabing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.171.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.171.700,00	Rp. 15.865.389,00
6	01	01	2.02					Rp. 6.234.323.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.234.323.000,00	Rp. 6.300.000.000,00
6	01	01	2.02	0001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tabing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak		Rp. 6.234.323.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.234.323.000,00	Rp. 6.300.000.000,00
6	01	01	2.03					Rp. 15.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0
6	01	01	2.03	0002	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tabing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.000.000,00	Rp. 0
6	01	01	2.05					Rp. 1.446.493.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.446.493.000,00	Rp. 1.830.000.000,00
6	01	01	2.05	0002	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tabing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 72.133.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 72.133.000,00	Rp. 80.000.000,00
6	01	01	2.05	0009	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tabing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak		Rp. 1.374.360.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.374.360.000,00	Rp. 1.750.000.000,00
6	01	01	2.06					Rp. 856.995.600,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 856.995.600,00	Rp. 434.994.000,00
6	01	01	2.06	0001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tabing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak		Rp. 12.119.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.119.700,00	Rp. 135.000.000,00
6	01	01	2.06	0002	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tabing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak		Rp. 28.785.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 28.785.200,00	Rp. 25.650.000,00
6	01	01	2.06	0004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tabing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak		Rp. 118.528.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 118.528.700,00	Rp. 125.750.000,00
6	01	01	2.06	0005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tabing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak		Rp. 69.758.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 69.758.000,00	Rp. 73.500.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1
								Tahun - 1	Tahun N				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	Rp. 627.804.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 627.804.000,00	Rp. 75.094.000,00
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 0,00	Rp. 498.946.400,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 498.946.400,00	Rp. 777.020.000,00
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 308.020.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 308.020.000,00	Rp. 308.020.000,00
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	Rp. 0	Rp. 44.774.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 44.774.300,00	Rp. 42.000.000,00
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	Rp. 0	Rp. 146.152.100,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 146.152.100,00	Rp. 427.000.000,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 236.414.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 236.414.000,00	Rp. 276.000.000,00
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	Rp. 14.150.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.150.000,00	Rp. 16.000.000,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 122.808.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 122.808.000,00	Rp. 140.000.000,00
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	Rp. 99.456.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 99.456.000,00	Rp. 120.000.000,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 120.200.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 120.200.000,00	Rp. 226.750.000,00
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	Rp. 47.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 47.200.000,00	Rp. 146.750.000,00
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	Rp. 44.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 44.000.000,00	Rp. 50.000.000,00

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
							Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 29.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 29.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	
Jumlah								Rp. 11.642.916.200,00	Rp. 538.946.400,00			Rp. 12.181.862.600,00	Rp. 14.205.321.210,20
								Kota Tebing Tinggi.....					
								Inspektur					

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2024. Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Tebing Tinggi.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1 Rumusan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	sumber dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
Inspektorat Daerah				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Kebutuhan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	9.426.306.700	APBD KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Bulanan Penyelesaian Laporan	12 bulan	17.934.700	APBD KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulanan Ketersediaan Penghasilan ASN	12 bulan	6.234.323.000	APBD KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan Pakaian dinas dan diklat ASN	1 tahun	1.446.493.000	APBD KOTA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan komponen listrik, perlengkapan kantor, bahan logistic, cetakan, dan perjalanan dinas	12 bulan	856.995.600	APBD KOTA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan meubiler, dan peralatan kantor	1 tahun	498.946.400	APBD KOTA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan surat menyurat, ketersediaan jasa komunikasi dan listrik, ketersediaan jasa pegawai	1 tahun	236.414.000	APBD KOTA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan kendaraan dinas, gedung peralatan, kantor,	1 tahun	120.200.000	APBD KOTA
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pengawasan Internal Yang Ditindaklanjuti	97 Persen	2.278.140.500	APBD KOTA
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan kinerja, keuangan, reviw laporan kinerja, review laporan keuangan, pengawasan desa, Kerjasama pengawasan desa,	1 tahun	1.576.881.000	APBD KOTA

	Kerjasama pengawasan internal, moneyv tindak lanjut pemeriksaan BPK dan APIP			
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya penyelesaian kerugian negara, dan pengawasan dengan tujuan tertentu	1 tahun	701.259.500	APBD KOTA
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Hasil Pembinaan Internal Yang dilaksanakan	97 Persen	477.415.400	APBD KOTA
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	terlaksananya kegiatan penilaian kapabilitas APIP	1 tahun	45.587.900	APBD KOTA
Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya kegiatan pendampingan asistensi, RB, pemberantasan korupsi, dan SPI KPK	1 tahun	431.827.500	APBD KOTA
JUMLAH			12.181.862.600	

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Tebing Tinggi dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi.

Adapun arah kebijakan pembangunan bidang urusan telah tertuang di dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, berkaitan dengan segala aktivitas dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah maka, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 1% dari total belanja daerah untuk kabupaten/kota yang memiliki Belanja Daerah kurang dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah). Anggaran pengawasan yang dimaksud adalah merupakan kegiatan inti yang ada di Inspektorat seperti pemeriksaan, reviu, evaluasi, Monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Setiap anggaran pendanaan yang dititipkan kepada Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah amanah rakyat dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, untuk itu Inspektorat Kota Tebing Tinggi selalu menggunakan prinsip Efisiensi, Efektif dan kehati-hatian dalam mengelola setiap anggaran yang ada.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 ini, maka diharapkan kerja keras dari seluruh aparatur pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi agar tujuan dan sasaran kinerjanya dapat tercapai dengan baik.

Tebing Tinggi, 15 Maret 2024
INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI



H. KAMLAN, SH, MM, CGCAE
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650603 198602 1 004